

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tingkat kebutuhan lahan dan pemukiman di suatu daerah merupakan dua hal pokok yang dapat dipengaruhi oleh peningkatan jumlah penduduk. Keadaan tersebut menyebabkan timbulnya alih fungsi lahan pertanian di pinggir kota menjadi lahan perumahan dan memunculkan sebuah permasalahan baru. Permasalahan ini mengancam produksi pangan daerah maupun nasional karena terbatasnya lahan pertanian. Salah satu wilayah dengan jumlah penduduk tertinggi di Jawa Tengah adalah Kota Semarang. Menurut BPS (2023), jumlah penduduk di Kota Semarang pada tahun 2020 mencapai 1.653.524 jiwa, dan meningkat pada tahun 2022 sebesar 0,22% menjadi 1.659.975 jiwa.

Seiring dengan adanya peningkatan jumlah penduduk, kebutuhan akan konsumsi sayur juga semakin tinggi, tetapi tidak diimbangi dengan ketersediaan luas lahan yang memadai. Tingkat konsumsi sayur per kapita di Kota Semarang pada tahun 2020 mengalami kenaikan menjadi 33,25 kkal dibandingkan pada tahun 2018 yang hanya 31,28 kkal (BPS, 2021). Namun, peningkatan konsumsi tersebut berbanding terbalik dengan jumlah lahan pertanian di Kota Semarang yang semakin berkurang. Menurut Anggrainy & Isharyanto (2021), dalam kurun waktu tiga tahun, yaitu dari tahun 2018 – 2020 telah terjadi alih fungsi penggunaan lahan pertanian menjadi non-pertanian di Kota Semarang seluas $\pm 731.938.775 \text{ m}^2$ dan tersebar di beberapa wilayah di Kota Semarang.

Upaya yang dilakukan untuk mengendalikan alih fungsi lahan dan menjaga ketersediaan pangan, selain melalui Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah, adalah dengan mengembangkan program pertanian perkotaan. Pertanian perkotaan (*urban farming*) merupakan sebuah solusi alternatif yang digunakan untuk mengatasi keterbatasan lahan akibat maraknya alih fungsi lahan pertanian di perkotaan. Pelaksanaan program *urban farming* di Kota Semarang sudah dimulai sejak tahun 2016 dan mulai gencar digaungkan pada tahun 2019. Program tersebut mendapat dukungan langsung dari Pemerintah melalui Peraturan Walikota Semarang Nomor 24 Tahun 2021 tentang Gerakan Pembudayaan Pertanian Perkotaan di Kota Semarang. Selain itu, tercantum dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang tahun 2011 - 2031, bahwa salah satu sasaran dalam menghadapi isu ketahanan pangan di Kota Semarang adalah pengembangan pertanian perkotaan dengan indikator kinerja meningkatnya jumlah kawasan pertanian perkotaan serta sentra produk unggulan (Handayani *et al.*, 2018).

Urban farming memberikan dampak positif dari segi ekonomi, seperti membuka lapangan kerja, meningkatkan penghasilan masyarakat, mengurangi kemiskinan, meningkatkan jumlah wiraswasta, dan meningkatkan produktivitas lingkungan perkotaan. Melalui penerapan *urban farming* lahan dengan luas dan kondisi apapun dapat diolah menjadi lahan produktif. Keberadaan *urban farming* dapat menjadi sarana mengoptimalkan pemanfaatan lahan dan sumber daya alam perkotaan menggunakan teknologi tepat guna.

Upaya untuk meningkatkan potensi sektor pertanian di Kota Semarang terus digencarkan oleh Pemerintah Kota Semarang melalui Dinas Pertanian, dengan pengadaan program “Ayo Nandur” dan sejauh ini sudah terdapat 151 kelompok tani *urban farming* di Kota Semarang. Kelompok - kelompok *urban farming* tersebut tersebar di 16 kecamatan, salah satunya adalah Kecamatan Gajahmungkur (Maulana *et al.*, 2022). Program *urban farming* di Kecamatan Gajahmungkur dijalankan oleh 10 kelompok tani dan kelompok wanita tani yang tersebar di delapan wilayah Kelurahan dengan kelas kemampuan yang berbeda-beda. Menurut Margolang (2018) kelas kemampuan kelompok tani dibagi menjadi 4 kelas, yaitu kelas pemula (kelas belajar), kelas lanjut (kelas usaha), kelas madya (bisnis), dan kelas utama (kelas mitra).

Menurut data Dinas Pertanian Kota Semarang tahun 2022, dari 10 kelompok tani di Kecamatan Gajahmungkur yang termasuk kelas kelompok tani pemula antara lain KT Bendan Ngisor, KT Gajah Berseri, KWT Sari Asri, dan KT Lempong Sari. Kelompok tani pada kelas lanjut yaitu KT Bumi Rejo Makmur, KWT Fatayat Yasmin, KT Sekar Tani. Kelompok tani pada kelas madya adalah KWT Puspitasari. Sedangkan 2 kelompok tani lainnya yang belum masuk dalam kelas kelompok tani yaitu KT Berkah Mandiri dan KWT Bendungan Serasi. Harapan dari masing-masing kelompok tani tersebut adalah dapat berkembang menjadi kelompok tani kelas utama, yaitu kelompok tani yang sudah berjalan dengan sendirinya atas dasar prakarsa dan swadaya sendiri.

Selama proses keberjalanan program *urban farming* oleh kelompok tani di Kecamatan Gajahmungkur, terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi.

Permasalahan yang terjadi berputar pada persoalan modal dan lahan. Permasalahan permodalan sering dialami oleh kelompok tani saat awal merintis dan membutuhkan modal untuk pengolahan lahan serta budidaya. Permasalahan lahan terkait status kepemilikan lahan, status lahan perseorangan yang digunakan kelompok tani akan berpengaruh terhadap perizinan usaha dan perolehan kerjasama dengan pihak swasta berupa *Corporate Social Responsibility* (CSR). Di sisi lain, terdapat beberapa potensi yang dapat dikembangkan menjadi lebih baik dan unggul untuk kedepannya.

Potensi yang dimiliki kelompok tani di Kecamatan Gajahmungkur dalam pelaksanaan program *urban farming* adalah sistem pertaniannya yang beragam. Pemanfaatan keterbatasan lahan membuat sistem pertanian yang dijalankan oleh masing-masing kelompok tani lebih kreatif dan bermacam-macam, seperti sistem vertikultur, hidroponik, dan aquaponik. Hal tersebut juga didukung oleh keinginan dan motivasi dari anggota kelompok tani untuk mengembangkan kegiatan pertanian yang dijalankan. Selain dari potensi tersebut, pelaksanaan program *urban farming* juga mendapatkan dukungan langsung dari pemerintah, melalui pemberian subsidi benih, bibit, dan satu set peralatan untuk hidroponik. Terdapat juga kerjasama dengan pihak swasta berupa CSR yang direkomendasikan oleh penyuluh lapang setempat.

Melihat adanya potensi yang dapat dikembangkan dan didukung oleh berbagai pihak, maka program *urban farming* menjadi suatu hal yang penting untuk dikelola secara bijak. Untuk itu strategi pengembangan merupakan suatu langkah besar yang dapat dilaksanakan dengan melihat berbagai kemungkinan

yang akan terjadi sehingga peluang yang muncul dapat dimanfaatkan secara maksimal dan ancaman yang datang dapat dihadapi dengan baik. Dengan adanya strategi pengembangan program *urban farming* diharapkan dapat mewujudkan ketahanan pangan dan peningkatan ekonomi masyarakat di Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang melalui kegiatan kelompok tani dilingkungannya.

1.2. Tujuan

Berdasarkan latar belakang di atas, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisis faktor lingkungan eksternal program *urban farming* di Kecamatan Gajahmungkur.
2. Menganalisis strategi pengembangan program *urban farming* di Kecamatan Gajahmungkur.

1.3. Manfaat

Manfaat dari penelitian ini antara lain:

1. Bagi Pembaca, dapat digunakan sebagai sumber pengetahuan dan informasi terkait strategi pengembangan *urban farming*.
2. Bagi Penulis, dapat digunakan sebagai sumber pengetahuan dan sarana pembelajaran terkait strategi pengembangan *urban farming* dan bekal untuk melakukan penelitian tugas akhir.
3. Bagi Petani, dapat digunakan sebagai masukan dan sumber informasi tambahan dalam menentukan arah dan pedoman pengembangan *urban farming*.

4. Bagi Pemerintah dan Dinas terkait, dapat digunakan sebagai bahan masukan dan referensi untuk menambah kepustakaan dan pertimbangan dalam pengambilan keputusan terkait strategi pengembangan *urban farming* bagi pihak-pihak yang membutuhkan.